POLITIK KEKERABATAN AGUS AMBO DJIWA PADA PEMILUKADA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020

Rusmawaty Bte. Rusdin

Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako

bintangros@gmail.com

Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118, Indonesia

Abstract

One study that is interesting to discuss is the political kinship established by the Agus Ambo Djiwa clan. Agus Ambo Djiwa has played an important role in Pasangkayu politics in building politics since 2005 to become deputy regent and then to regent two for the 2010-2020 period. Now he has successfully led his brother and wife to become regents and deputy regents of Pasangkayu in the 2021-2024 period. The purpose of this study was to determine the modalities of Agus Ambo Djiwa's kinship politics in winning the political event in Pasangkayu. This study uses a qualitative method. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. Data analysis used the Miles and Huberman model, namely data collection, data reduction, data presentation and verification. The results showed that there was an inheritance of leadership politics in Pasangkayu which was after the expansion of the Mamuju district. The Agus Ambo Djiwa clan won the 2020 elections because it has four basic material modalities, namely the Ambo Djiwa Family social capital, which is one of the figures in the formation of the division of North Mamuju Regency which is currently known as Pasangkayu and Agus Ambo Djiwa still in control of the regional bureaucracy, cultural capital relying on family names and politics ethnic identity, political capital supported by political parties and economic capital originate from personal wealth and donations from donors.

Keywords: Capital; Kinship Politics; Party Politic; Regional Head Elections

Abstrak

Salah satu kajian yang menarik untuk dibahas adalah politik kekerabatan yang dibangun oleh marga Agus Ambo Djiwa. Agus Ambo Djiwa berperan penting dalam politik Pasangkayu dalam membangun politik sejak tahun 2005 menjadi wakil bupati dan kemudian menjadi bupati dua periode 2010-2020. Kini ia berhasil mengantarkan adik-adiknya menjadi bupati dan wakil bupati Pasangkayu periode 2021-2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modalitas politik kekerabatan Agus Ambo Djiwa dalam memenangkan perhelatan politik di Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pewarisan politik kepemimpinan di Pasangkayu setelah pemekaran Kabupaten Mamuju. Marga Agus Ambo Djiwa memenangkan Pemilu 2020 karena memiliki empat modalitas material dasar yaitu modal sosial Keluarga Ambo Djiwa yang merupakan salah satu tokoh dalam pembentukan pemekaran Kabupaten Mamuju Utara yang saat ini dikenal dengan Pasangkayu dan Agus Ambo. Djiwa masih menguasai birokrasi daerah, modal budaya bertumpu pada nama keluarga dan politik identitas etnis, modal politik yang didukung oleh partai politik dan modal ekonomi yang bersumber dari kekayaan pribadi dan sumbangan dari donatur.

Keywords: Modalitas; Politik Kekerabatan; Pemilu Kepala Daerah; Politik Partai

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pasca reformasi bergulir politik lokal di Indonesia memberikan ruang kepada elit lokal memperlihatkan eksistensi terlihat beberapa klan politik memanfaatkan demokrasi elektoral mengamankan jabatan eksekutif dan legislatif kepada keluarga, kroni dan loyalis mereka. Praktek semacam ini sering kita jumpai di daerah-daerah yang baru mekar seperti yang terjadi di Banten. Bahkan beberapa klan politik berhasil menjadikan provinsi atau kabupaten sebagai wilayah kekuasaan arena baru memperluas kekuasaan. Pola ini yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu klan Agus Ambo Djiwa sangat mewarnai eksekutif dan legislatif.

Kekuatan politik keluarga Agus Ambo Djiwa merupakan oligarki baru pasca pemekaran Kabupaten Pasangkayu. Penguatan politik kekerabatan yang terjadi di Pasangkayu ketika salah satu pasangan calon yang berafiliasi dengan politik kekerabatan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu. Studi terkait politik kekerabatan di Pasangkayu menarik untuk dilakukan sebab pasangan calon bupati Yaumil Ambo Djiwa merupakan kakak dari Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa dan calon wakil bupati H. Erny merupakan istri dari Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa yang memenangkan pertarungan pemilukada Pasangkayu pada tanggal 9 Desember 2020. Dan tak kalah menariknya dua hari sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Arfandi Yaumil Ambo Djiwa didaulat menjadi wakil ketua I DPRD Pasangkayu mengganti ayahnya Yaumil Ambo Djiwa yang terpilih sebagai Bupati Pasangkayu.

Karir politik klan Ambo Djiwa pasca kabupaten Mamuju Utara yang saat ini berganti nama Pasangkayu pemekaran dari kabupaten induk yaitu Mamuju terbilang bagus. Kemenangan pasangan Yaumil-Erni semakin memperluas kekuasaan Agus Ambo Djiwa. Meskipun saat ini Agus Ambo Djiwa tak menjabat apa-apa lagi di birokrasi namun masih memiliki kuasa melalui PDI-Perjuangan sebagai ketua DPD Provinsi Sulawesi Barat yang nantinya bisa dijadikan sebagai *bargaining* politik untuk perhelatan pilkada Gubernur Sulawesi Barat pada tahun 2024.

Tujuan penelitian untuk mengetahui politik kekerabatan klan Agus Ambo Djiwa bekerja dalam memenangkan kontestasi politik di Pasangkayu. Pada dasarnya pemilukada menjanjikan sejumlah harapan dan impian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun pemilukada secara langsung dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai tahun 2020 tak lepas dari segala fenomena seperti masih menggurita politik kekerabatan.

Politik kekerabatan bukanlah sesuatu yang baru hadir dalam demokrasi, kehadiran dinasti dianggap menjadi anti tesis dari demokrasi yang dapat menimbulkan sebuah keresahan dan kekhawatiran yang mengakibatkan distribusi kekuasaan politik yang tidak berimbang (Dal Bó et al., 2007). Kekhawatiran Mosca kini sangat beralasan bahwa setiap

kelas berupaya mewariskan kekuasaannya secara turun menurun sehingga kedudukan keluarga penguasa mendapatkan sejumlah keberuntungan (Haryanto, 2017).

Politik kekerabatan yang biasa disebut politik dinasti pada pemilukada tahun 2020 masih mewarnai perhelatan politik. Data yang disebutkan oleh Nagara Institute dari 270 calon kandidat yang mengikuti pilkada pada tahun 2020 sekitar 124 pasangan calon yang terafiliasi dengan politik dinasti (Nagara, 2020). Studi yang baru ini dilakukan oleh seorang kandidat doktor politik Universitas Northwestern, Amerika Serikat Yoes C. Kenawas meningkat tajam dari 124 yang mencalonkan 76 yang meraih kemenangan dibanding pilkada tahun 2015. Sehingga memungkinkan potensi penyalahgunaan kekuasaan terutama birokrasi dan *conflict interest* (CNN, 2020). Sejalan dengan ungkapan Lord Acton *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely* artinya kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.

Idealnya demokrasi memberikan peluang kepada siapa saja untuk menduduki kekuasaan dalam merebut jabatan-jabatan politik baik di eksekutif maupun legislatif mulai level pusat sampai daerah. Namun kenyataannya berbeda munculnya fenomena yang disebut politik kekerabatan tidak hanya di Indonesia saja namun di negara seperti Amerika terjadi demikian.

Fenomena dinasti politik yang makin berkembang khususnya di Indonesia tidak terlepas kegagalan pelembagaan partai politik melakukan rekrutmen kader serta regulasi yang longgar. Politik kekerabatan mengakibatkan substansi demokrasi sulit diwujudkan. Pola rekrutmen kandidasi yang dilakukan partai politik berdasarkan kepentingan elit partai bukan karena mempertimbangkan kemampuan serta integritas dari calon bahkan malahan memberikan ruang menguatnya politik kekerabatan dengan memberikan dukungan memenangkan kompetensi politik (Harjanto, 2011). Sementara politik kekerabatan terus membangun jaringan melalui partai politik, eksekutif dan legislatif dengan menduduki posisi strategis agar tetap kuat mempertahankan kekuasaan (Herna Susanti, 2017: 122).

Penguatan politik kekerabatan di Pasangkayu tidak terlepas dukungan partai politik terlihat jelas saat partai politik Partai Perindo Kabupaten Pasangkayu lebih mendukung keluarga petahana (*incumbent*) pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny ketimbang memilih kadernya Muh. Yusri ketua DPC Perindo Pasangkayu yang ikut konstestasi pilkada Pasangkayu sebagai calon wakil bupati Pasangkayu. Partai politik terkesan pragmatis tidak mempertimbangkan aspek kader. Bahkan ada sepuluh partai mendukung pencalonan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny diantaranya Golkar, PDI-P, PKS, Gerindra, PAN, PKB, PBB, PPP, Perindo, PKPI

Politik kekerabatan sebagai salah satu senjata dalam memenangkan pertarungan pilkada karena figur yang ditampilkan mampu menarik masyarakat untuk memilih. Pasangan Yaumil Ambo Djiwa - Herny memiliki ciri khas tersendiri mampu memenangkan pertarungan

tanpa harus berkoalisi dengan klan mana pun atau suku mana pun. Di beberapa daerah kemenangan politik kekerabatan masih didukung figur dari suku tertentu atau mempertimbangkan daerah pemilihan namun pilkada Pasangkayu tidak demikian. Kekuatan Agus Ambo Djiwa yang masih memegang jabatan Bupati mampu mengendalikan birokrasi serta sumber daya lainnya untuk memenangkan kakak dan istrinya. Artinya penguatan politik kekerabatan masih sangat bergantung pada kekuatan birokrasi dan partai politik.

KPU Pasangkayu menetapkan pilkada di Pasangkayu diungguli oleh pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Hery meraih perolehan 36.787 suara, posisi urutan suara ke dua ditempati oleh pasangan Abdullah Rasyid-Muh. Yusri Nur sebanyak 26.550 suara sementara yang berada diposisi urutan ketiga ditempati pasangan Muhammad Saal-Musawir Az. Isham sebanyak 21.478 suara.

Fenomena politik kekerabatan klan Agus Ambo Djiwa terbilang cukup unik. Dimana mereka bukanlah dari kalangan golongan bangsawan, pejabat atau dari tokoh adat. Modal yang dimiliki hanya modal sosial pada saat menjadi tim komite aksi perjuangan kabupaten Mamuju Utara. Modal sosial ini berkembang mengarah menjadi modal politik dan modal ekonomi.

Terpilihnya pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Hery pada pemilu kabupatda Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 menegaskan bahwa sesungguhnya masyarakat Kabupaten Pasangkayu menganggap politik kekerabatan suatu kewajiban sehingga tidak perlu diperdebatkan terlepas cara yang digunakan terkadang tidak wajar. Terlepas isu-isu negatif seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Risman Ambo Djiwa yang sempat buron 10 tahun (Yunus, 2020 : 1) dan Amir Hamzah Ambo Djiwa terjerat kasus korupsi Bank BPD Sulsel (Zul, 2020 : 1) merupakan adik Agus Ambo Djiwa, maupun positif namun politik kekerabatan Agus Ambo Djiwa tetap memperlihatkan eksistensinya pasca Pasangkayu dimekarkan tahun 2003 keluarga Agus Ambo Djiwa hingga saat ini masih berkuasa.

Makna politik kekerabatan beririsan dengan nama yang dikenal selama ini dengan dinasti politik. Mengenai dinasti politik tidak hanya terjadi di Indonesia namun belahan dunia lain yang penganut paham demokrasi juga mengadopsi pola-pola tersebut dengan mendudukkan keluarga dalam jabatan baik di eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Hal ini memperlihatkan bahwa ada ketidaksempurnaan sebuah sistem. Bertahannya elit karena memiliki kerabat di pemerintahan memiliki peluang untuk selalu dikenal oleh masyarakat sehingga pemilih cenderung memilih seseorang karena memilih anggota keluarga sebelumnya.

Pemaknaan politik keluarga secara perspektif politik kekerabatan dikenal dengan istilah politik dinasti yang sampai saat ini belum ada definisi yang seragam. Menurut Dal Bo

yang dimaksud dengan politik dinasti adalah seorang politisi mempunyai hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya yang memegang kekuasaan (Dal Bó et al., 2007 : 2). Sementara Pablo mendefinisikan dinasti politik adalah upaya elit mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan keluarga memonopoli kekuasaan (Querubin, 2016). Sementara Asako politik dinasti politik ketika satu anggota keluarga menjabat kekuasaan sebelumnya dijabat kembali oleh keluarganya (Asako et al., 2015). Sementara Stephen mengatakan bahwa dinasti politik adalah anggota keluarga dalam satu garis keturunan apabila terdapat 4 orang atau lebih menduduki suatu jabatan strategis dalam politik (Purwaningsih, 2015 : 101). Beberapa pengertian politik kekerabatan ditarik kesimpulan bahwa ketika 4 orang atau dua generasi dalam satu keturunan menduduki jabatan politik memegang kekuasaan baik di eksekutif maupun di legislatif. Suksesi politik kekerabatan biasanya tidak dianggap demokratis. Politik kekerabatan sering disebut *political family*. Menurut Kurtz bahwa *political family* adalah apabila dua orang atau lebih menduduki jabatan politik memiliki hubungan kekerabatan. *Political family* merupakan budaya politik yang memberikan keuntungan politik kepada keluarga atau kerabat bahkan menempatkan ikatan kekerabatan lebih tinggi ketimbang ikatan lainnya. Pandangan neopatrimonialisme adalah pandangan melihat dinasti politik sesuatu hal yang negatif dari demokrasi karena yang diutamakan adalah relasi hubungan kekeluargaan.

Politik kekerabatan terus berkembang dalam demokrasi electoral. Kehadiran politik kekerabatan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat yang kontra akibat beberapa calon pengganti baik suami, istri, anak dan keluarga yang lain yang minim dengan pengalaman dan kapasitas. Mereka ditawarkan pada bursa pencalonan pemilu karena berlingkup dibawah kekuasaan orang tua, suami atau keluarga dekatnya (Haboddin, 2017 : 11).

Studi terkait politik kekerabatan sudah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Fenomena politik kekerabatan bukanlah hal baru dalam demokrasi beberapa diantaranya pada tingkat lokal seperti Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul, Klaten, Bontang, Kutai Kertanegara dan Bali (Purwaningsih, 2015 : 100). Fenomena politik kekerabatan bukan hanya terjadi dalam negeri namun diluar negeri seperti yang terjadi di Filipina (Tadem & Tadem, 2016), Amerika Serikat (Hess, 2017), Jepang (Asako et al., 2015), Belgia (Van Coppenolle, 2014), Pakistan (Ahmad & Rehman, 2020), Thailand (Thananithichot & Satidporn, 2016).

Studi terkait politik kekerabatan dalam pemilu telah dilakukan oleh Dalbo di Amerika Tadem di Filipina dan Thananithichot & Satidporn di Thailand menunjukkan karakter yang sama bahwa kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan politik sangat memungkinkan peluang kemenangan lebih besar untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum sehingga yang terjadi jika seseorang memegang kekuasaan lebih, kemungkinan besar orang tersebut akan memulai, atau melanjutkan, dinasti politik (Dal Bó et

al., 2007). Hal ini disebabkan kekuatan mesin politik yang dimiliki dapat diwariskan kepada keluarga meskipun tidak memiliki kemampuan politik. Politik dinasti menawarkan daya tarik tersendiri untuk memenangkan perhelatan politik (Asako et al., 2015 : 8).

Praktek politik kekerabatan menimbulkan sentimen negatif sebab tidak terlepas dari kasus korupsi seperti yang terjadi di Banten dan Klaten (Herna Susanti, 2017). Bragança dan Rios mengatakan bahwa politik kekerabatan membawa dampak buruk dalam pertumbuhan ekonomi sementara menghabiskan sumber daya yang cukup banyak (Bragança et al., 2015 : 6). Pendapat ini bisa ditelusuri melalui program-program petahana mendekati pilkada diarahkan kepada pembangunan infrastruktur dan hibah bansos. Studi yang dilakukan Mendoza dkk di Filipina bahwa politik kekerabatan menyebabkan kemiskinan (Mendoza et al., 2013). Tidak hanya studi yang dilakukan oleh Querubin menilai bahwa dinasti politik sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan kekuasaan dan etika politik sehingga membuat pemerintahan tidak berjalan dengan efektif dan efisien serta menciptakan ketidakadilan (Querubin, 2016).

Pada dasarnya terbentuknya politik kekerabatan diakibatkan tiga hal diantaranya, pertama rekrutmen partai politik tidak berjalan dalam melahirkan kader-kader yang memiliki kualitas untuk menduduki jabatan politik di eksekutif maupun dilegislatif. Kedua, kondisi masyarakat masih memberi kepercayaan oleh petahana atau keluarga petahana. Ketiga, keinginan kuat petahana menginginkan kekuasaan dijabat oleh keluarganya sehingga terbentuklah dinasti politik (Purwaningsih, 2015).

Menguatnya politik kekerabatan karena memiliki sejumlah modalitas sehingga kemenangan mudah diraih. Pada dasarnya modalitas ada empat yakni modal sosial diantaranya relasi dan jaringan, modal kultural diantaranya nama keluarga dan identitas suku dan modal ekonomi diantaranya kekayaan, uang dan properti menurut Buerdieu (Pierre, 1986 : 16-26). Namun Casey menambahkan modal politik (Casey, 2008). Modal material yang diungkapkan oleh Buerdieu masih sangat sederhana sementara pemelukada modal politik memiliki peran yang sangat strategis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pilihan terhadap metode kualitatif sangat tepat dan relevan untuk mengkaji secara mendalam politik kekerabatan klan Agus Ambo Djiwa karena dalam karena ada suatu permasalahan atau isu yang perlu dieksplorasi (Denzin, 2009). Pendekatan studi kasus lebih tepat digunakan pada satu objek kajian, program atau peristiwa tertentu dengan melakukan penyelidikan secara mendalam agar mendapat jawaban dari rumusan masalah penelitian (Creswell, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan melihat biografi keluarga Agus Ambo Djiwa serta data

perolehan suara. Wawancara dari politisi, tokoh masyarakat dan pegawai yang diambil dengan metode *snow ball*. Teknis analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, *condensation data*, data display dan kesimpulan (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014). Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan beberapa cara antara lain deskripsi, tabel dan kombinasi diantara cara-cara tersebut. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan di Kabupaten Pasangkayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik kekerabatan di negara demokrasi menurut banyak orang sebagai fenomena yang membingungkan. Kajian terkait politik kekerabatan bukanlah hal yang baru dalam kajian politik beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan riset terkait politik kekerabatan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kekhawatiran bahwa kelas politik dapat menjadi turun-temurun jika tidak dalam hukum maka dalam praktiknya telah dikemukakan pada awal abad ke-20 oleh penulis seperti Mosca dan Michels (Haryanto, 2017: 26). Sebuah kelas politik dapat mengabadikan dirinya sendiri jika ia dapat menggunakan lembaga-lembaga demokratis untuk mengontrol jalan masuk ke politik. Namun, tidak tertutup kemungkinan pemahaman ini ditanamkan pada anak-anak dari orang tua yang aktif secara politik dengan sehingga termotivasi terjun ke politik. Para pemilih mungkin lebih memahami pilihan kebijakan apa yang akan mereka buat. Mereka bahkan mungkin menganggap mereka lebih berbakat dan sesuai dengan tugas. Meskipun penjelasan yang pasti lebih ramah dan mungkin sangat nyata untuk berlanjutnya politik turun-temurun dalam demokrasi, argumen ini gagal untuk sepenuhnya meyakinkan.

Fenomena politik kekerabatan kelihatannya semakin eksis di era reformasi menurut Titin Purnaningsih karena adanya peluang setiap saat melalui pemilihan legislatif dengan sistem proporsional daftar terbuka dan suara terbanyak maupun pemilihan kepala daerah serta kemunculan beberapa partai baru di manfaatkan dengan baik oleh beberapa keluarga politik dengan mengandalkan jaringan politik, sosial, birokrasi dan jaringan kekerabatan (Purwaningsih, 2015). Sebenarnya jika ditinjau dari aspek hukum tidak ada aturan dilanggar namun secara substansial ada pembajakan demokrasi.

Modal Sosial

Keluarga Ambo Djiwa merupakan salah tokoh terbentuknya pemekaran Kabupaten Mamuju Utara yang saat ini dikenal Pasangkayu. Ketokohan Ambo Djiwa dibangun saat menjadi seorang kepala desa Sarudu pada zaman orde baru. Ketokohan Ambo Djiwa dilanjutkan kedua anaknya yakni Agus Ambo Djiwa dan Yaumil Ambo Djiwa. Kedua anaknya ini memiliki peran penting dalam pemekaran kabupaten Pasangkayu. Agus Ambo Djiwa sebagai ketua komite Aksi pemekaran Kabupaten Mamuju Utara sedangkan Yaumil Ambo Djiwa sebagai sesepuh pada saat itu menjabat sebagai kepala desa menggantikan

bapakny. Setelah pemekaran kiprah kedua anak Ambo Djiwa semakin memperlihatkan eksistensi dirinya pada pemilu tahun 2004 mengikuti pemilihan legislatif dua-duanya lolos menjadi anggota DPRD. Pada saat itu Agus Ambo Djiwa terpilih menjadi wakil ketua DPRD dari PDI-P sementara Yaumil Ambo Djiwa terpilih menjadi Ketua DPRD dari Partai Golkar. Dengan rentang waktu 17 tahun keluarga Agus Ambo Djiwa sudah memiliki modal sosial mulai dari ayahnya sebagai kepala desa dan diwariskan kepada anak dan cucunya.

Kemenangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny menjadikan politik kekerabatan senjata utama. Perolehan suara yang unggul dari kandidat lainnya memberikan dampak yang besar karena masyarakat masih mempercayakan kepada keluarga Agus Ambo Djiwa meneruskan tampuk kekuasaan yang selama 15 tahun dipegang. Tak heran kini kepemilikan modal sosial yang dibangun sejak dari orang tuanya kini masih digunakan berupa jaringan basis massa. Modal sosial yang ditanamkan oleh Agus Ambo Djiwa selama menjabat mulai wakil bupati sampai bupati kemudian di manfaatkan oleh kakaknya dan istrinya saat maju sebagai kandidat calon bupati dan wakil bupati Pasangkayu. Kemenangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny merupakan kelanjutan kemenangan Agus Ambo Djiwa. Selain warisan basis massa kemenangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny karena adanya dukungan birokrasi daerah yang pada saat itu masih dibawah kekuasaan Agus Ambo Djiwa sehingga dengan mudah birokrasi daerah diarahkan memberikan dukungan.

Birokrasi merupakan salah satu kekuatan politik yang menjadi incaran baik itu politisi atau partai politik dalam memenangkan perhelatan politik baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Kenyataan ini sudah lama dipertontonkan oleh *incumbent* maupun birokrat senior yang ikut bertarung dalam setiap perebutan jabatan kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Usaha dari figur *incumbent* dan birokrat senior mempolitisasi birokrasi merupakan proyek besar yang harus ditaklukkan dalam dinamika politik lokal. Dikatakan demikian karena birokrasi sudah di kuasai oleh pasangan calon, maka pengerahan massa dan pemanfaatan fasilitas negara secara otomatis bisa dinikmati secara gratis (Sahdan & Haboddin, 2009 ; 177). Terjadinya pengerahan birokrasi dalam mendukung kandidat yang melibatkan *incumbent* atau keluarga petahana sudah sering kita lihat seperti pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta (More, 2012), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Jawa Timur (Firnas, 2016).

Fakta politik yang menyebutkan keterlibatan birokrasi lokal dalam pemilukada senantiasa menyeruak ke permukaan melalui laporan media massa maupun hasil penelitian yang dilakukan pemerhati politik dan akademisi. Keterlibatan birokrasi dalam pemilukada setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan keterlibatan birokrasi dalam pemilukada sangat ditentukan oleh pasangan calon yang ikut bertarung dalam pemilukada. Jika pasangan

calon yang ikut bertarung melibatkan *incumbent* dan birokrat senior sudah pasti pengerahan birokrasi oleh kedua belah pihak akan terjadi secara besar-besaran. Fenomena ini terjadi dalam pemilihan dalam beberapa pemilihan gubernur. Sebut saja, di Sulawesi Selatan, Provinsi Banten, DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sumatera Selatan (Sahdan & Haboddin, 2009 : 177).

Pengerahan birokrasi oleh Petahana ataupun birokrat senior dalam pemilukada bisa disebut politisasi birokrasi. Syafuan Rozi mendefenisikan politisasi birokrasi adalah upaya yang dilakukan oleh birokrat atau politisi dalam rangka mengarahkan pilihan politik kepada kandidat tertentu untuk memperoleh kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan (Rozi, 2006) Pada pemilukada di Pasangkayu upaya politisasi birokrasi masih sangat kental terjadi bahkan kemenangan pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny karena mendapatkan dukungan dari birokrasi yang masih dipimpin oleh Agus Ambo Djiwa yang merupakan kakak Yaumil Agus Ambo Djiwa sekaligus suami dari Herny. Pada pemilukada di Pasangkayu politisasi birokrasi diwarnai dengan ancaman bagi guru, pegawai serta penerima bantuan sosial yang tidak memilih pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny akan mendapatkan sanksi dan janji bagi pendukung Yaumil Ambo Djiwa dan Herny mendapatkan promosi jabatan dan bantuan sosial. Terbukti pada tanggal 6 Januari 2021 mutasi pegawai pertama pasca pemilukada dilakukan oleh Agus Ambo Djiwa yang sarat dengan politik. Bahkan beberapa pihak berkata mutasi dilakukan sebagai bentuk pemberian sanksi kepada pegawai yang memilih selain pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny.

Pola-pola pemberian sanksi diberikan kepada pegawai karena berbeda pilihan sangat disayangkan. Birokrasi seharusnya sebagai abdi masyarakat bukan menjadi alat kekuasaan untuk memenangkan pertarungan. Birokrasi kini menjelma menjadi kekuatan politik yang berkuasa sulit dikontrol oleh kekuatan sosial dan politik. Birokrasi tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa politik dan bukan aktor netral dalam arena politik. Bagi Marx birokrasi sebagai instrumen bagi kelas berkuasa (Sahdan & Haboddin, 2009 :178).

Kekuatan birokrasi yang masih dipegang oleh Agus Ambo Djiwa semakin memperkuat kemenangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny dan memperkuat politik kekerabatan Agus Ambo Djiwa. Politik kekerabatan yang dibangun oleh Agus Ambo Djiwa bersama Yaumil Ambo Djiwa memungkinkan akan bertahan lama sebab belum ada figur baru menjadi penyeimbang kekuatan politik. Artinya politik kekerabatan Agus Ambo Djiwa akan menunjukkan eksistensinya meskipun sebenarnya sangat mencederai demokrasi. Fred W Rings secara tegas menyebutkan tingginya tingkat keterlibatan birokrasi dalam arena politik Hal ini disebabkan karena para birokrat selalu mempunyai tertentu dalam politik (Haboddin & Rozuli, 2017). Keterlibatan birokrasi pada pemilukada Pasangkayu tak dapat terhindarkan akibat kepentingan keluarga Agus Ambo Djiwa yang ikut bertarung sehingga

pola-pola pelibatan birokrasi mengisyaratkan bahwa birokrasi bertautan erat dengan sistem politik.

Modal Kultural

Umumnya di Sulawesi kultur kekeluargaan merupakan faktor pendukung kemenangan tidak hanya dalam pemilu lokal maupun pemilihan legislatif. Fenomena keluarga politik atau nama besar keluarga dijadikan sebagai modal kultural dalam mengikuti kompetisi politik yang bisa dikonversi menjadi sebuah kekuasaan.

Praktik kekuasaan dengan melibatkan atau mengikutsertakan keluarga dalam struktur disebut politik kekerabatan. Politik kekerabatan di Pasangkayu muncul pasca pemekaran Kabupaten Pasangkayu. Agus Ambo Djiwa sebagai ketua Komite Aksi pemekaran Kabupaten Pasangkayu memulai peruntungan politik mengikuti pemilu tahun 2004 terpilih menduduki posisi wakil ketua II DPRD Kabupaten Mamuju Utara dari PDI-Perjuangan Dapil II Sarudu Baras, tahun 2005-2010 menjadi Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara dan tahun 2010-2020 menjadi Bupati Pasangkayu. Rantai kekuasaan keluarga Agus Ambo Djiwa tidak hanya berhenti sampai disitu pada pilkada tahun 2020 melalui kakaknya Yaumil Ambo Djiwa menjadi calon Bupati Pasangkayu berpasangan H. Herni yang tak lain istri dari Agus Ambo Djiwa menjadi calon wakil bupati Pasangkayu berhasil memenangkan perhelatan politik. Politik kekerabatan Agus Ambo Djiwa bisa ditelusuri dari sejumlah jabatan yang dipegang oleh keluarganya melalui tabel 1 diantaranya :

Tabel 1. Fenomena Politik Kekerabatan Klan Agus Ambo Jiwa

No	Nama	Jabatan	Hubungan
1	Agus Ambo Djiwa	Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara periode 2005-2010 Bupati Kabupaten Mamuju Utara menggantikan nama menjadi Kabupaten Pasangkayu periode 2010-2020 Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat	
2	Yaumil Ambo Djiwa	- Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara 2004-2009 - Ketua DPRD 2009-2014 - Wakil Ketua 2014-2019 - Wakil Ketua 2019-2020 - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasangkayu - Bupati Pasangkayu 2021-2024	Kakak
3	Arfandi Yaumil Ambo Djiwa	- Anggota DPRD Pasangkayu periode 2014-2019 - Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu 2019-2021 - Wakil Ketua I DPRD Pasangkayu menggantikan Yaumil Ambo Djiwa Pasangkayu periode 2021-2024	Ponakan (Anak Yaumil Ambo Djiwa)
4	H. Erni Agus	Wakil Bupati Pasangkayu periode 2021-2024	Istri

5	Amir Hamzah Ambo Djiwa	Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara periode 2009-2014 (Terjerat Kasus Korupsi Bank BPD Sulsel)	Adik
6	Kasmuddin	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasangkayu	Ipar
7	Kartini	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasangkayu	Ponakan

Sumber: Data : Hasil Olah, 2021

Merujuk tabel diatas bahwa sesungguhnya kehadiran politik kekerabatan Agus Ambo Djiwa sejak lama sudah dibangun melalui partai politik, eksekutif dan legislatif, sehingga tak heran jika kemenangan mudah didapatkan sebab modalitas kultural yang dibangun sejak lama yang merupakan warisan basis kultural ayahnya sebagai kepala desa Sarudu yang dilanjutkan Yaumil Ambo Djiwa menggantikan ayahnya sebagai kepala desa.

Modal kultural yang tak kalah menariknya menjadi jualan politik pada pemilukada tahun 2020 di Pasangkayu adalah menjual isu politik identitas mengangkat isu suku. Tiga pasangan kandidat yang maju sebagai calon Bupati dan wakil bupati, pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny dianggap representasi warga asli Pasangkayu.

Tabel 2. Suku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu

No	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Suku
1	Muhammad Saal Musawir Az. Isham	Mandar Kaili (Baras) dan Mamuju
2	Abdullah Rasyid Moh. Yusri Nur	Bugis Mamuju dan Mandar
3	Yaumil Ambo Djiwa Herny	Kaili (Sarudu) Kaili (Sarudu)

Sumber : Hasil olah, 2021

Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa calon Yaumil Ambo Djiwa satu-satu calon Bupati Pasangkayu merupakan penduduk asli dari wilayah Pasangkayu sementara H. Muhammad Saal dan Abdullah Rasyid merupakan bukan warga asli Pasangkayu. Meskipun Musawir Az. Isham dianggap warga Pasangkayu namun hanya berada diposisi wakil sementara sebagai masyarakat menginginkan Bupati Pasangkayu warga asli Pasangkayu.

Modal Politik

Kemunculan politik kekerabatan di Indonesia tidak terlepas dari kegagalan partai politik menjalankan fungsinya melakukan rekrutmen politik. Namun kecenderungan yang terjadi anggota keluarga menjadi pengurus partai politik sehingga politik kekerabatan makin tetap eksis. Partai politik seharusnya tidak hanya mementingkan kelanggengan kekuasaan semata namun partai politik harus mampu melahirkan kader – kader yang berkualitas dan berintegritas. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai dalam mendudukkan kader-kadernya dalam jabatan politik. Setiap partai politik memiliki mekanisme berbeda melakukan rekrutmen calon dengan menetapkan sejumlah persyaratan tertentu namun kenyataannya aturan yang telah dibuat dan disepakati tidak dijalankan disebabkan

adanya kepentingan elit partai. Biasanya calon kandidat yang sudah memiliki nama keluarga sebagai modal sosial yang berpengaruh disertai modal ekonomi yang mapan memiliki peluang untuk dicalonkan.

Penggunaan politik kekerabatan sebagai pintu masuk untuk melakukan rekrutmen politik memperlihatkan bahwa sesungguhnya politik keluarga bisa hadir dimana saja, kapan saja dan digunakan siapa saja selama memiliki pengaruh sumber daya. Gambaran politik kekerabatan klan Agus Ambo Djiwa dijadikan salah sumber rekrutmen politik partai politik. Strategi yang dilakukan partai politik berhasil. Ketika anggota keluarga memiliki sebuah kekuasaan maka sangat memungkinkan maka sangat mungkin keluarga yang lain akan menjajaknya. Menurut Titin kehadiran politik kekerabatan semakin menjamur diakibatkan sosialisasi yang dilakukan anggota keluarga secara internal untuk memberikan dukungan mengikuti kompetisi politik maka tidak heran setiap pemimpin selalu ingin melanggengkan kekuasaan dengan cara mewariskan kepada istri, anak, saudara dan kerabat lainnya (Purwaningsih, 2015)

Penggunaan politik keluarga sebagai pintu utama dalam rekrutmen politik cukup menjelaskan bahwa politik keluarga ada dimana saja, kapan saja dan digunakan siapa saja selama ada kekuatan besar untuk mempengaruhi sumber daya. Tidak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula. Gambaran perjalanan politik keluarga/klan/dinasti politik yang tergambar diatas, menggambarkan secara gamblang bahwa bagaimana keluarga dijadikan sumber rekrutmen politik utama adalah sesuatu yang sah dan justru dijadikan sebagai strategi paling berhasil.

Dalam hal ini, ketika seorang anggota keluarga memiliki kekuasaan dan berhasil menguasai sumber daya yang ada, maka sangat mungkin dan mudah bagi anggota keluarga yang lain untuk menjejaknya. Karena berhasilnya satu anggota keluarga dalam memegang pengaruh politik, diibaratkan seperti membuka pintu yang akan dengan mudah membiarkan anggota keluarga yang lain untuk masuk dan menjadi bagian dari elit penguasa itu sendiri.

Kemenangan pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny semakin mempertegas kekuatan politik kekerabatan mampu meraih dukungan sejumlah partai politik dalam proses pencalonan pilkada. Modal politik yang dimiliki Yaumil Ambo Djiwa adalah ketua DPD II Golkar Pasangkayu dan Agus Ambo Djiwa adalah ketua DPD PDI-P Provinsi Sulawesi Barat sehingga dua partai ini saja sudah cukup untuk mengusung Yaumil-Herni, namun tidak puas hanya dua partai beberapa turut memberikan dukungan diantaranya Gerindra, PKB, PAN, Perindo, PKS, PPP, PBB dan PKPI. Jumlah partai pengusung Yaumil Ambo Djiwa dan Herny terbilang cukup banyak sehingga sangat disayangkan partai-partai pengusung lainnya tidak mampu melahirkan kader-kader yang siap bertarung. Bahkan isu berkembang pada

awalnya pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny mengharapkan melawan kotak kosong. Namun proses pendaftaran partai Hanura, Demokrat dan Nasdem mendukung pasangan Muhammad Saal-Musawir Az. Isham sementara pasangan Abdullah Rasyid-Muh. Yusri Nur melalui jalur persorangan.

Modal Ekonomi

Modal ekonomi merupakan modal yang sangat penting dalam pemilukada yang dapat dikonversi menjadi uang dan hak milik. Pemilukada yang begitu mahal membuat kandidat harus memiliki modal ekonomi setidaknya sebagai bagian untuk memenangkan pertarungan. Untuk melihat modal ekonomi calon kepala daerah bisa dilihat dari kekayaan pribadi yang dimiliki melalui tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Harta Kekayaan Pribadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020

No	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Harta Kekayaan Pribadi (Rp.)
1	Muhammad Saal	1.647.171.428
	Musawir Az. Isham	9.037.187.985
2	Abdullah Rasyid	12.101.787.985
	Moh. Yusri Nur	1.578.500.000
3	Yaumil Ambo Djiwa	6.021.787.057
	Herny	2.804.619.666

Sumber : e-LHKPN KPK, 2021

Data diatas memperlihatkan bahwa setiap calon kandidat memiliki modal ekonomi yang cukup memadai. Pasangan Abdullah Rasyid Dan Muhammad Yusri Nur nomor urut dua memiliki jumlah kekayaan berada pada urutan nomor satu. Tak bisa dipungkiri kekayaan merupakan salah satu penopang pencalonan kandidat. Setiap penyelenggaraan pemilukada membutuhkan dana untuk membiayai kelancaran aktivitas. Dana politik ini digunakan untuk biaya kegiatan atau kepentingan pemilukada. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber penggunaan. Dilihat dari sumbernya dana politik berasal dari sumbangan pasangan calon dan sumbangan dari para simpatisan donatur baik perseorangan maupun perusahaan. Dana politik juga bisa diartikan sebagai wujud kongkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah.

Uang adalah sarana untuk meraih kekuasaan. Dalam studi ilmu politik disebutkan bahwa uang adalah salah satu sumber kekuasaan. Menurut Herbert Alexander uang adalah instrumen atau alat untuk mengetahui bagaimana ia digunakan orang untuk mendapat pengaruh atau diubah menjadi sumberdaya dalam rangka meraih kekuasaan politik uang (Ardianto, 2019 : 5).

Uang memiliki kekuatan dalam pemilu termasuk dalam pemilukada. Kekuatan uang dalam pilkada amat dasyatnya. Hal ini disampaikan Okhtariza , uang sangat berarti bagi keberhasilan kandidat dalam pemilihan umum sehingga tidak heran ketika terjadinya *money politic* Jawa Barat, Jawa Tengah untuk mempengaruhi pilihan politik politik pemilih (Okhtariza,

2019). Cara kerja uang menjadi penting saat kampanye, karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang. Uang adalah sumber utama bagi pasangan calon dalam memenangi atau tetap mempertahankan kekuasaan. Kuasa uang dalam pemilu terdapat pada bagaimana uang digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.

Politik kekerabatan adalah upaya membangun kekuasaan politik keluarga melalui pemilu dan pemilihan legislatif baik tingkat nasional maupun lokal. Tujuan membangun kekuasaan politik agar kekuatan keluarga terjaga dan kekal dalam rangka melanggengkan kekuasaan melalui eksekutif maupun legislatif. Upaya yang menonjol dalam politik kekerabatan dengan memasukkan anak, istri, saudara dan kerabat dalam posisi strategis baik di pemerintahan maupun partai politik bahkan membentuk agen pengusaha lokal dari lingkungan keluarga bertindak mengumpulkan pundi-pundi keuangan untuk kepentingan politik atau memperkaya diri.

Selain kekayaan yang dimiliki oleh kandidat salah satu faktor pendukung dalam memenangkan pertarungan ada bantuan atau sumbangan dari donatur dalam hal ini adalah pengusaha yang memiliki peran penting dalam pemilu. Kehadiran pengusaha bukanlah hal yang baru sebab pada masa orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto pengusaha dijadikan penyokong kerajaan politik dan kerajaan bisnis bersama anaknya (Alfarizi & Aji, 2009 : 2). Relasi pengusaha dan penguasa terbangun ada hubungan simbiosis mutualisme. Pengusaha dalam pemilu merupakan aktor penting untuk memenangkan pertarungan. Mahalnya biaya pemilu memaksa kandidat untuk membangun relasi dengan pengusaha yang saling menguntungkan satu sama lain, pengusaha imbalan *finansial* dan dukungan politik sementara penguasa memberikan proyek pra dan pasca pemilu sehingga tak heran pada saat mendekati hari pemilihan banyak proyek infrastruktur di daerah pemilihan tertentu. Praktek semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun di negara-negara berkembang seperti India, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan.

Pada pemilu Pasangkayu pada tahun 2020 tidak bisa dipungkiri pengusaha nasional maupun lokal mengambil peran memberikan dukungan politik maupun *finansial* kepada kandidat. Bahkan tak jarang pengusaha bermain tidak hanya memberikan dukungan kepada satu kandidat saja namun kepada semua kandidat. Pemilu Pasangkayu sarat dengan kepentingan sehingga tak heran jika pengusaha ikut andil dalam proses pemilu. Pola-pola yang dilakukan mulai dari memberikan sejumlah uang kepada kandidat untuk digunakan sebagai biaya operasional calon kandidat melamar partai politik, memesan alat peraga calon kandidat seperti baliho dan spanduk, tak sampai disitu perannya berlanjut pada tahapan pemilu di mulai sampai tahapan berakhir. Bantuannya sangat bervariasi

mulai dari uang, alat dan bantuan lainnya. Pola pengusaha ini sangat beragam ada yang membuat perjanjian dengan tanda tangan dan ada juga tidak. Namun unik nya pilkada Pasangkayu kehadiran kontraktor-kontraktor lokal. Kontraktor ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sebab hasil pengerjaan proyeknya terkesan tidak memenuhi standar. Kontraktor lokal ini memiliki jaringan langsung ke kepala dinas bahkan ke Bupati sehingga tak heran jika mereka mendapatkan proyek penunjukkan langsung dengan konsekuensi memberikan dukungan kepada pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny.

Keterlibatan pengusaha dalam politik bukanlah sesuatu hal baru di Indonesia. Bahkan pengusaha memiliki peran penting dalam perpolitikan. Pengusaha bisa berperan ganda hadir sebagai pengusaha sekaligus penguasa. Pengusaha dan penguasa saling memiliki hubungan simbiosis mutualisme saling menguntungkan satu sama lain. Penelitian yang dilakukan Yoshihara Kunio dalam mengatakan bahwa pengusaha di Indonesia tidak mandiri hanya mengandalkan hubungan kedekatan dengan penguasa untuk mendapatkan keuntungan proyek-proyek dari pemerintah (Alfarizi & Aji, 2009 :5).

Keberadaan pengusaha lokal memiliki pengaruh cukup kuat dalam pemilukada sebagai penopang kemenangan Yaumil Ambo Djiwa. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Pasangkayu maupun pengadaan barang-barang kebutuhan pemerintah daerah Pasangkayu menjadi ladang pengusaha lokal di Pasangkayu yang memiliki akses ke kepala Dinas Pekerjaan Umum . Praktek semacam ini juga terjadi seperti di Sumatera Barat para pengusaha berafiliasi dengan penguasa untuk memperkaya diri melalui politik anggaran pendapatan belanja daerah (Alfarizi & Aji, 2009). Hasil keuntungan proyek tersebut sebagian digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu. Dengan jaminan pasca pemilukada jika kandidatnya menang akan mendapatkan proyek-proyek infrastruktur pembangunan. Bahkan tak jarang pula kontraktor-kontraktor lokal pra pemilukada mendapatkan proyek-proyek pemerintah untuk wilayah geografis tertentu dalam rangka meraih simpati masyarakat di wilayah tersebut agar kemenangan mudah diraih. Praktek proyek semacam ini biasa disebut *project barrel project* (proyek-proyek gentong babi) proyek atau program-program di dani dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik (Edward, Aspinall & Sukmajati, 2015) .

KESIMPULAN

Mengentalnya politik kekerabatan pasca reformasi bahkan pada pemilukada ini merupakan buah demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural dimaknai siapapun bisa mencalonkan pada pemilukada sepanjang memenuhi persyaratan yang telah tentukan. Namun dibalik itu politik kekerabatan dikhawatirkan membahayakan demokrasi yang mengarahkan terjadinya konfigurasi elit sehingga sirkulasi elit sulit diharapkan. Partai politik yang diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang siap pakai namun faktanya justru sebaliknya partai politik memiliki andil menyuburkan politik kekerabatan. Praktek politisasi birokrasi masih terjadi

bahkan birokrasi dijadikan pondasi pemenangan kandidat selain itu pengusaha lokal lebih memilih membangun relasi dengan penguasa yang berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan kehadiran keluarga di panggung politik. Praktek politik kekerabatan tumbuh subur di pemilukada karena memiliki modalitas ekonomi, kultural, sosial dan politik.

REFERENSI

- Ahmad, N., & Rehman, F. U. (2020). Political Dynasties and Political Competition in Pakistan. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3531639>
- Alfarizi, D., & Aji, M. (2009). *Pengusaha dan Politik: Studi Motivasi Pengusaha Mengikuti Pemilu Legislatif di Kabupaten*.
- Ardianto, H. T. (2019). Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4733>
- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 16(1). <https://doi.org/10.1017/S146810991400036X>
- Bragança, A., Ferraz, C., Juan Rios, P.-R., Casey, K., Chandrasekhar, A., Duggan, M., Dupas, P., Hoxby, C., Jha, S., Labonne, J., Moser, P., Manoel Pinho de Mello, J., Pereira, C., & Persson and, P. (2015). *Political Dynasties and the Quality of Government* ←.
- Casey, K. (2008). *Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory*. June, 1–25.
- CNN. (2020). *Dinasti Politik di Pilkada 2020 Disebut Meningkatkan, 67 Menang*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201216200833-32-583132/dinasti-politik-di-pilkada-2020-disebut-meningkat-67-menang>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2007). Political Dynasties. In *National Bureau of Economic Research*. <https://doi.org/10.3386/w13122>
- Denzin, N. K. dan Y. S. L. (eds. . (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Edward, Aspinall, & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM.
- Firnas, M. A. (2016). Politik Dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi. *Review Politik*, 6(1), 160–194. <https://www.mendeley.com/catalogue/0834afb5-ed2c-32ae-a24c-ce41bd6efd56/>
- Haboddin, M. (2017). POLITIK KELUARGA DALAM PILKADA SERENTAK. In *Jurnal Transformative* (Vol. 3, Issue 2). <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/110>
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2017). Birokrasi, korupsi, dan kekuasaan. *Jurnal Transformative*, 1(1).
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 40(2).

- Haryanto. (2017). *Elit, Massa dan Kekuasaan Suatu Bahasan Pengantar*. Polgov FISIP UGM.
- Herna Susanti, M. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111–119.
- Mendoza, R., Beja, E., Venida, V., & Yap, D. (2013). Political dynasties and poverty: Resolving the "chicken or the egg" question. *Ateneo School of Government Faculty Publications*. <https://archium.ateneo.edu/asog-pubs/101>
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- More, I. (2012). *Politikasi Birokrasi Masih Kental dalam Pilkada DKI*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/07/18032695/Politikasi.Birokrasi.Masih.Kental.dalam.Pilkada.DKI>
- Nagara. (2020). *Nagara Institute: Ada 124 Calon Terkait Dinasti di Pilkada*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012203716-32-557603/nagara-institute-ada-124-calon-terkait-dinasti-di-pilkada>
- Okhtariza, N. (2019). Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa. In *Centre for Strategic and International Studies*.
- Pierre, B. (1986). *THE FORMS OF CAPITAL*.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>
- Querubin, P. (2016). Family and politics: Dynastic persistence in the philippines. *Quarterly Journal of Political Science*, 11(2), 151–181. <https://doi.org/10.1561/100.00014182>
- Rozi, S. (2006). *Zaman Bergerak, Birokrasi Di Rombak*. Pustaka Pelajar.
- Sahdan, G., & Haboddin, M. (2009). *Evaluasi Kritis Penyelenggara Pilkada di Indonesia*. The Indonesia For Democracy.
- Tadem, T. S. E., & Tadem, E. C. (2016). Political dynasties in the Philippines: Persistent patterns, perennial problems. In *South East Asia Research* (Vol. 24, Issue 3, pp. 328–340). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0967828X16659730>
- Thananithichot, S., & Satidporn, W. (2016). Political Dynasties in Thailand: The Recent Picture after the 2011 General Election. *Asian Studies Review*, 40(3), 340–359. <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1193473>
- Van Coppenolle, B. (2014). *Political Dynasties and Elections*.
- Yunus, M. (2020). *10 Tahun Jadi Buronan Korupsi, Adik Bupati Pasangkayu Ditangkap - Suara Sulsel*. <https://sulsul.suara.com/read/2020/12/22/090159/10-tahun-jadi-buronan-korupsi-adik-bupati-pasangkayu-ditangkap?page=all>
- Zul. (2020). *Catatan Terpidana Korupsi Sang Mantan Pegawai PU Pasangkayu, DPO Selama 10 Tahun Dicokok di Magelang - Pojokcelebes.com*. Pojok Celebes. <https://pojokcelebes.com/2020/09/11/catatan-terpidana-korupsi-sang-mantan-pegawai-pu-pasangkayu-dpo-selama-10-tahun-dicokok-di-magelang/>